

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jaminan Perorangan Pada PT FIF

Kota Padang, yaitu:

- a. Adanya penilaian risiko
- b. Adanya persetujuan
- c. Adanya penandatanganan perjanjian
- d. Adanya pencatatan jaminan
- e. Adanya pelaksanaan jaminan
- f. Adanya penyelesaian dan pelunasan

2. Upaya Penyelesaian Kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT. FIF

Kota Padang

Banyak upaya yang dilakukan oleh Perusahaan yang terkait debitur wanprestasi, yaitu:

- a. Pemberian peringatan
- b. Renegoisasi perjanjian
- c. Penagihan langsung
- d. Pelaksanaan Jaminan
- e. Penyelesaian secara hukum
- f. Pemulihan asset.

B. Saran

1. Perlunya komunikasi dengan terbuka dan jelas dengan debitur dan coba pahami penyebab wanprestasi dan cari Solusi Bersama untuk menyelesaikan masalah keuangan.
2. Perlunya memahami dan pertimbangkan kondisi keuangan debitur dan mencari Solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
3. Perlunya terus pantau kondisi keuangan debitur dan beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Salim HS, 2023, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan Ke-11, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori Penyusunan Kontrak)*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Depok
- Suratman dan Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakanke-4, Cv Alfabeta, Bandung
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang
- Daeng Naja, 2018, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Depok.
- Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Tentang Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia
- Pada Peraturan Anggaran Dasar dan Anggaran Pelaksanaan PT. FIF

A. Sumber Lain

- Adrian Alexander Posumah, 2017, 'Pengikatan Jaminan Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Bank Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998', *Law Reform: Lex Privatum*, Vol. 5 No. 1, Januari-Februari 2017.
- Almira Jasmine, 2021, 'Kekuatan Eksekutorial Terhadap Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Dikaitakan Dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetntang Jaminan Fidusia', *Law Reform: Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 1, Desember 2021.

Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, dkk, 2020, 'Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)', *Law Reform: Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020

Istiana Heriani 2014, 'Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Law Reform: Al 'Ulum*, Vol. 61, No. 3, Juli 2014